

Sambutan

Ketua Badan Pengurus *Transparency International Indonesia* pada Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2009

Hari ini Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2009 *Transparency International* diluncurkan. Dengan skala 0 (yang berarti dipersepsikan paling korup) hingga 10 (yang berarti dipersepsikan paling tidak korup), sebanyak 180 negara di seluruh dunia diukur tingkat korupsi sektor publiknya berdasarkan persepsi masyarakat global.

Sungguh menyedihkan melihat bahwa dari 180 negara, 129 di antaranya mendapat skor di bawah 5, yang berarti nyaris 3/4 dari total negara yang diteliti. Hanya 51 negara yang memperoleh skor di atas atau sama dengan 5.

Tahun ini Indonesia kembali 'naik kelas'. Indonesia naik dua poin dari 2,6 pada tahun lalu (2008) menjadi 2,8 pada tahun ini (2009). Dengan skor ini, ranking Indonesia pun terdongkrak cukup signifikan: 111 dari 180 negara (naik 15 posisi dari tahun lalu); meski agak *tengsin* juga kita melihat Indonesia berada di 'geng 111' ini bersama dengan negara-negara seperti Algeria, Djibouti, Mesir, Kiribati, Mali, Sao Tome dan Principe, Kepulauan Solomon, dan Togo. Terlihat bahwa satu-satunya negara besar lain di grup ini hanyalah Mesir.

Untuk ukuran lingkungan ASEAN, Indonesia juga tidak lagi menduduki posisi yang tak jauh-jauh dari posisi juru kunci, melainkan sudah 'naik kelas' ke posisi menengah, yakni ke-5 dari 10 negara. Padahal sebelumnya Indonesia acap berlangganan posisi lima bawah.

Indeks Persepsi Korupsi 2009 Negara-negara ASEAN

Peringkat ASEAN	Peringkat Dunia	Negara	Indeks Persepsi Korupsi
1	3	Singapura	9,2
2	39	Brunei Darussalam	5,5
3	56	Malaysia	4,5
4	84	Thailand	3,4
5	111	Indonesia	2,8
6	120	Vietnam	2,7
7	139	Filipina	2,4
8	158	Kamboja	2,0
8	158	Laos	2,0
10	178	Myanmar	1,4

Bila nilai *ngepas* untuk 'lulus' adalah 5, maka tentulah belum saatnya Indonesia bertepuk dada dengan apa yang dicapai dalam IPK tahun ini. Terlebih lagi,

Transparency International sendiri dalam rilisnya terkait IPK 2009 ini juga mengatakan skor suatu negara jauh lebih penting daripada rangkingnya.

Namun, bagaimanapun juga, ini semua tentunya merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Bagaimanapun ini adalah suatu kemajuan. Bangsa Indonesia **seharusnya** memiliki alasan untuk berbangga hati. Kerja pemberantasan korupsi beberapa tahun belakangan ini terbukti tidak sia-sia.

Akan tetapi, sayang seribu sayang IPK ini diluncurkan di tengah-tengah suasana 'berkabung' rakyat Indonesia akan masa depan pemberantasan korupsi negerinya. Ia hadir menyeruak di tengah haru biru bangsa ini menyaksikan drama pilu cicak dihajar buaya. Sehingga, kita rasanya menjadi urung bertempik sorak dan bertepuk dada atas pencapaian ini.

Betapa tidak. Tanpa menafikan peran yang tidak kalah penting dari semua pihak lain, di mata banyak orang prestasi pemberantasan korupsi Indonesia beberapa tahun belakangan ini adalah prestasi yang identik dengan buah kerja keras KPK. Akan tetapi ironisnya hari-hari ini dua Pimpinan non-aktif KPK sedang menghadapi hari-hari kelabu. Jerih payah itu berbuah ganjaran pidana. Karena *meneken* tiga surat yang memang merupakan lingkup kewenangan Pimpinan KPK, mereka dikenai sangkaan-sangkaan pidana. Bahkan sempat mendekam di hotel prodeo pula. Dalam bahasa gaul anak muda, sangkaan-sangkaan dan penahanan terhadap mereka terkesan *maksa banget*.

Oleh karena itu kehadiran kabar baik dari IPK 2009 ini menjadi kehadiran sebuah ironi. Terus terang saya jadi tidak tahu harus merasa senang atau sedih ketika membaca laporan IPK ini di tengah-tengah krisis seperti ini.

Perlu dicatat bahwa penelitian untuk IPK 2009 ini diadakan sebelum berkecamuknya 'ribut-ribut' cicak melawan buaya, sehingga tidak merefleksikan persepsi publik akan pemberantasan korupsi di republik ini dengan adanya prahara ini. Sekiranya penelitian yang sama diadakan hari ini, saya yakin niscaya skor Indonesia akan jauh lebih buruk dari 2,8. Menurunnya popularitas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pengamatan mutakhir sejumlah media dan peneliti agaknya dapat menjadi indikator yang mengonfirmasi keyakinan tersebut.

Sementara itu, hari ini laporan dan rekomendasi akhir Tim 8 yang bertugas memverifikasi fakta dan proses hukum seputar kasus dua Pimpinan non-aktif KPK tersebut—Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah—diserahkan kepada Presiden SBY. Bola pun kembali bergulir ke tangan Beliau. Oleh karena itu, dengan laporan dan rekomendasi akhir Tim 8 di tangan, kini saatnya Presiden membuktikan bahwa kesan Beliau membiarkan krisis hukum ini berlangsung berlarut-larut mendera bangsa ini—dengan alasan 'prinsip non-intervensi terhadap proses hukum'—tidaklah benar. Saatnya Presiden membuktikan tidaklah benar Beliau tidak memiliki *sense of crisis* atau tidak berpihak dengan tegas pada pemberantasan korupsi. Saatnya Presiden membuktikan program pertama dari Program 100 Hari Pertamanya—memberantas mafia hukum—dengan tindakan konkret, di tengah masih beredarnya

Anggodo Widjojo di alam masyarakat bebas merdeka. Saatnya Presiden menunjukkan *leadership* dan ketegasannya dalam bertindak, karena di tengah krisislah fungsi kepemimpinan seorang pemimpin diuji.

Usai sudah Tim 8 mengemban amanatnya. Laporan dan rekomendasi akhir Tim 8 kini berada di tangan sang pemberi amanat. Kini masyarakat Indonesia dan dunia menanti dengan harap-harap cemas ujung dari prahara ini. Ya, akhir dari drama ini niscaya akan turut menentukan skor IPK kita tahun depan. Jadi mari kita berharap semoga tahun depan kita masih bisa 'naik kelas'.

Jakarta, 17 November 2009

Todung Mulya Lubis